TEORI DAN KONSEP DASAR KEUANGAN ISLAM

MAKALAH

*Dipresentasikan pada Mata Kuliah Ekonomi Moneter Islam Program Studi
Perbankan Syariah Semester V Tahun 2021*

Oleh :

Kelompok 2

- 1. Warda (90500119077)**
- 2. Febrianty (90500119067)**
- 3. Sulaeman (90500119090)**

DOSEN :

Samsul, S.A.B.,MA.

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2021/2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penyusun panjatkan kepada Allah S.W.T, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah Ekonomi Moneter Islam dengan judul ***“Teori dan Dasar Keuangan Islam”***.

Makalah ini didasarkan pada tugas Ekonomi Moneter Islam. Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan artikel ini.

Penulis memahami bahwa artikel ini masih belum lengkap, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaannya.

Akhir kata, Penyusun mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan makalah ini terdapat banyak kesalahan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi para pembaca.

Makassar, 21 September 2021

Penyusun

Kelompok 2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Pembahasan	3
BAB II	
KAJIAN TEORI.....	4
A. Keuangan	4
B. Keuangan Islam.....	4
BAB III	
PEMBAHASAN.....	6
A. Ruang Lingkup Keuangan Islam.....	6
B. Filosofi Keuangan Islam.....	8
C. Prinsip Maqashid Syariah Keuangan Islam.....	9
D. Prinsip Hukum dan Moral Islam dalam Keuangan Islam.....	11
E. Implikasi Hukum dan Moral Islam dalam Aktivitas Ekonomi dan Keuangan	14
F. Implementasi Sistem Keuangan Islam.....	17
G. Infastruktur Sistem Keuangan Islam.....	18
BAB III	
PENUTUP.....	20
A. Kesimpulan.....	20
B. Saran	20
DAFTAR PUSTAKA	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengapa keuangan Islam ada? Kebangkitan keuangan Islam setidaknya didorong oleh tiga faktor: ideologi agama, pengalaman praktis, dan disiplin idealis. Ideologi agama merupakan dasar fundamental dari ajaran Islam, yaitu keinginan umat Islam untuk menerapkan konsep-konsep keuangan Islam untuk menjadikan Islam sebagai way of life mereka. hujan). Konsep dan praktik keuangan tradisional yang ada melanggar sejumlah prinsip syariah, termasuk unsur-unsur seperti riba, gila, dan meysir. Di sisi lain, menurut faktor empiris politik empiris, setelah periode kemerdekaan dari kolonialisme Barat (sekitar tahun 1940-an), negara-negara Islam bercita-cita untuk menjadi mandiri secara ekonomi juga. Sistem keuangan tradisional sekarang dianggap lebih menguntungkan bagi Barat dan negara-negara Islam umumnya diklasifikasikan sebagai negara berkembang. Pada saat yang sama, ada dana besar yang dimiliki oleh umat Islam, terutama negara-negara penghasil minyak, yang ingin diatur dengan prinsip-prinsip Islam. Aspirasi ini diwujudkan dalam pendirian Islamic Development Bank (IDB). IDB didirikan di Jeddah pada Desember 1973 dengan persetujuan para menteri OKI dan mulai beroperasi pada 1975. IDB bukanlah bank komersial, tetapi Bank Pembangunan (misalnya Bank Dunia) yang misinya adalah meningkatkan peluang pembangunan di negara-negara Islam. Sementara itu, dalam hal kesiapan akademik, studi akademik lainnya menemukan bahwa sistem keuangan tradisional dapat: i) Penyebab ketidakstabilan dan krisis ekonomi ii) memperlebar jurang antara kaya dan miskin, dan iii) sistem keuangan alternatif yang secara konseptual dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih egaliter dan harmonis.¹

¹ Nur Kholis, 'Potret Perkembangan Dan Praktik Keuangan Islam Di Dunia', *Millah: Jurnal Studi Agama*, XVII.1 (2017), 1–30 <<https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art1>>.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ruang lingkup keuangan Islam?
2. Bagaimanakah filosofi keuangan Islam?
3. Apa sajakah prinsip Maqashid Syariah Keuangan Islam?
4. Uraikan prinsip hukum dan moral Islam dalam keuangan Islam!
5. Bagaimanakah implikasi hukum dan moral Islam dalam aktivitas ekonomi dan keuangan?
6. Bagaimanakah implementasi sistem keuangan Islam?
7. Bagaimanakah infrastruktur sistem keuangan Islam?

C. Tujuan Pembahasan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari pemaparan materi ini adalah untuk :

1. Dapat mengetahui ruang lingkup keuangan Islam.
2. Dapat mengetahui filosofi keuangan Islam.
3. Dapat mengetahui prinsip Maqashid Syariah Keuangan Islam.
4. Dapat menguraikan prinsip hukum dan moral Islam dalam keuangan Islam.
5. Dapat mengetahui implikasi hukum dan moral Islam dalam aktivitas ekonomi dan keuangan.
6. Dapat mengetahui implementasi sistem keuangan Islam.
7. Dapat mengetahui infrastruktur sistem keuangan Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Keuangan

Keuangan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan, penciptaan, dan penelitian uang dan investasi. Keuangan dapat secara luas dibagi menjadi tiga kategori: keuangan, keuangan perusahaan, dan keuangan pribadi. Ada banyak kategori khusus lainnya, seperti keuangan perilaku, yang berusaha mengidentifikasi alasan kognitif (misalnya, emosional, sosial, psikologis) untuk membuat keputusan ekonomi.

Keuangan muncul sebagai divisi independen dari teori dan praktik ekonomi pada 1940-an dan 1950-an, bersama dengan karya-karya Markowitz, Tobin, Sharp, Trainer, Black, and Shoals. Tentu saja, masalah keuangan seperti uang, bank, pinjaman, dan investasi telah ada sejak awal sejarah manusia.

Saat ini, "keuangan" biasanya terbagi dalam tiga kategori utama. Keuangan termasuk perpajakan, pengeluaran pemerintah, prosedur anggaran, kebijakan dan alat stabilisasi, masalah utang, dan masalah pemerintah lainnya. Keuangan perusahaan mencakup pengelolaan kewajiban, pendapatan, aset, dan kewajiban perusahaan. Personal finance mendefinisikan semua keputusan dan aktivitas keuangan pribadi atau rumah tangga, termasuk perencanaan pensiun, penganggaran, perencanaan hipotek, asuransi, dan tabungan.²

B. Keuangan Islam

Keuangan Syariah adalah sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan dengan menggunakan prinsip-prinsip Islam dan hukum Islam sebagai patokan. Ini tidak hanya berlaku untuk sistem, tetapi juga untuk lembaga keuangan dan produk yang mereka tawarkan.

² Toko Pedia, 'Uang - Keuangan', 2009 <<https://kamus.tokopedia.com/u/uang-keuangan/>>.

Keuangan Islam adalah sistem yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, Dan juga dari penafsiran sumber-sumber wahyu oleh para ilmuwan. ciek Dalam bentuknya, struktur keuangan Islam menjadi peradaban yang tidak berubah. abad ke-14. Struktur keuangan Islam telah berubah selama 30 tahun terakhir. Dimulai sebagai salah satu implementasi modern terpenting dari sistem hukum Islam Sebagai ujian bagi pembaharuan dan pengembangan syariat Islam masa depan.³

³ Muh Arafah, *SISTEM KEUANGAN ISLAM: SEBUAH TELAAH TEORITIS*, *Journal of Islamic Economic and Business*, 2019, 1.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup Keuangan Islam

Menurut definisi "sistem" ini, ekonomi Islam merupakan bagian dari gaya hidup holistik dan didasarkan pada 4 ilmu yang berbeda: pengetahuan yang diwahyukan (Qur'an), praktik, dan Sunnah. Ini adalah kesimpulan dari analogi yang diterapkan pada masyarakat Islam yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, interpretasi dan konsensus yang kemudian disepakati oleh para ulama masyarakat yang dikenal sebagai ijma. "Sistem" ini mengandung mekanisme bawaan untuk berpikir jernih yang disebut ijtihad. Umat Islam memahami Ijtihad sebagai "upaya serius dan bertanggung jawab untuk mencari solusi atas semua masalah sosial, budaya dan politik yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan tradisi dan ajaran agama".⁴

Apabila ekonomi Islam dianggap bagian dari ilmu pengetahuan, Karena telah ditetapkan sebagai kebenaran mutlak Itu juga abadi. Oleh karena itu, pengetahuan ini memiliki kekuatan. Berubah dari waktu ke waktu. Hal yang sama berlaku untuk sains. Ekonomi Islam yang selalu menuntut perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman dan keadaan. Ekonom Amerika John S. Kems mengatakannya bahwa ekonomi bukanlah ilmu pengetahuan, itu adalah harapan ilmu pengetahuan.⁵

Ciri-ciri Sistem Keuangan Syariah: ⁶

1. Aset Negara Sistem Keuangan Syariah adalah milik Allah.
2. Rasul adalah orang pertama yang mempraktekkan keuangan Islam.
3. Sumber utama keuangan Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah.
4. Sistem keuangan Islam bersifat universal.

⁴ M A Mannan, 'M.A. Mannan, Islamic Economics as a Social Science: Some Methodological Issues', *Journal of Research in Islamic Economics*, 2.1 (1984), 49–50.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Daur Al-Qiyam Wa Al-Akhlaq Fi Al-Iqtishad Al-Islamiy*, Terj. Zainal Arifin Dan Dahlia Husin (Surabaya: Gema Insani Press, 1997).

⁶ Muhammad Qutb Ibrahim, *Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi Keuangan Islam Dan System Administrasi* (Gaung Perseda Press, 2007).

5. Keuangan Islam mendukung sistem keuangan negara-negara Islam.
6. Sistem keuangan Islam mengadopsi prinsip distribusi jasa sebagai sumber pendapatan pemerintah.
7. Sistem keuangan Islam transparan.
8. Sistem keuangan negara-negara Islam adalah gerakan kebaikan.
9. Sistem keuangan Islam termasuk modal toleransi terhadap umat Islam.

Ekonomi Islam merupakan bagian integral dari agama Islam karena dibangun di atas agama Islam. Ekonomi Islam, yang bersumber dari Islam, mengikuti Islam dengan berbagai cara. Islam adalah way of life (jalan hidup) yang disiapkan oleh Islam, termasuk jumlah bidang ekonomi Satu set lengkap aturan untuk kehidupan manusia. Beberapa aturan bersifat spesifik dan permanen, sementara yang lain bergantung pada keadaan dan kondisi.

Menurut uraian ini, M. Siafi Antonio menjelaskan bahwa syariat Islam adalah syariat yang bersifat all-encompassing atau menyeluruh, tetapi juga memiliki keunikan universal tersendiri. Karakter khusus ini diperlukan karena tidak ada Syariah lain yang dapat memperbaikinya. Dalam maknanya yang inklusif, syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik seremonial (ibadah) maupun sosial (muamalah). Universal artinya Syariah Islam dapat diterapkan kapan saja, di mana saja hingga hari kiamat. Keragaman ini terutama terlihat di wilayah Muamal. Muamal tidak membedakan antara Muslim dan non-Muslim selain cakupannya yang luas dan fleksibel.⁷

Monzer Kahf, dalam bukunya *Islamic Economics*, menjelaskan bahwa ekonomi adalah agama. Kata “ekonomi Islam” dipahami sebagai bagian integral dari paradigma Islam, sumbernya mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁸ Juga, menurut Kahf⁹, ekonomi Islam adalah bagian dari ekonomi yang interdisipliner di mana studi ekonomi Islam tidak dapat berdiri sendiri, tetapi membutuhkan pengetahuan yang baik dan mendalam tentang ilmu syariah dan ilmu di

⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 13th edn (Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia, 2009).

⁸ Monzer Kahf, *The Islamic Economy* (Plainfield: Muslim Student Association (US- Canada), 1978).

⁹ Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical Study of The Functioning Of the Islamic Economic System* (T.tt.: Plainfield In Muslim Student Association of U.S and Canada, 1978).

belakangnya. Bersifat ilmiah, termasuk fungsinya sebagai alat analisis, seperti logika statistik matematis.

B. *Filosofi Keuangan Islam*

Filsafat ekonomi adalah arah utama dalam ekonomi, yang mungkin berbeda dari agama ke agama atau dari sekolah ke sekolah karena sistem kepercayaan yang berbeda. Misalnya, penganut filsafat kapitalis masih percaya adanya Tuhan, tetapi percaya bahwa Tuhan yang menciptakan alam dan membuat hukumnya tidak lagi mencampuri urusan alam, termasuk urusan ekonominya. pria. Semua pertanyaan diputuskan oleh semua orang. Jadi, menurut pandangan filosofis ini, manusia memainkan peran yang sangat sentral, oleh karena itu, aliran ini adalah pandangan manusia yang individualisme. Pemahaman antroposentrisme ini juga diyakini dalam Marxisme-Sosialisme, tetapi perbedaannya adalah tidak percaya akan adanya Tuhan yang menciptakan alam, tidak menekankan pentingnya kepribadian, dan mengutamakan kesatuan atau kolektivitas. Bagi mereka, segala sesuatu adalah material dan tidak menyadari keberadaan yang immaterial. Oleh karena itu, pemahaman mereka disebut juga pemikiran sosialis materialistis. Ini jelas berbeda dengan filsafat dan kepercayaan yang terkandung dalam ajaran Islam.

Islam meyakini bahwa alam semesta ini berikut dengan isinya termasuk manusia adalah diciptakan oleh Allah Swt. (Q.s. al-Fâtiḥah [1]: 2), Tuhan Yang Maha Pencipta dan Mahakuasa tersebut telah menunjuk manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi (Q.s. al-Baqarah [2]: 30). Ini berarti bahwa manusia telah diangkat sebagai "perwakilan dan pemimpin Allah di bumi". Oleh karena itu, orang berkewajiban untuk bertindak, termasuk pengelolaan alam ini, dan/atau melakukan tindakan ekonomi sesuai dengan keinginan dan peraturannya.

Ekonomi Islam sebagai ilmu lahir sebagai hasil dari proses ilmiah yang panjang. Ekonomi Islam dapat menjadi sistem ekonomi alternatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak seperti ekonomi kapitalis dan sosialis yang terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dawam Rahardjo (1999) memilih istilah ekonomi Islam dalam tiga kemungkinan pengertian, yakni: ¹⁰

- a. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai atau ajaran Islam.
- b. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem. Sistem ini berkaitan dengan regulasi, yaitu mengatur kegiatan ekonomi suatu masyarakat atau negara berdasarkan cara atau cara tertentu.
- c. Ekonomi Islam dalam arti perekonomian Islam.

Namun, ekonomi Islam secara umum adalah Syariah Makasyid (agama, jiwa, akal, asal dan harta).¹¹

C. Prinsip Maqashid Syariah Keuangan Islam

Makashid syariah adalah tujuan yang diberikan oleh Allah dalam semua syariah atau hukum-hukumnya. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut makashid syariah, seperti maqashid al-syaari' atau maqashid al-syar'i, dan lafadz lain seperti asrar al-syaria'ah, 'al-'illah, murad al-syar'i, al-hikmah, al-maghza, al-mashlahah, al-ma'na, dan lain-lain. Dan antara lain istilah tersebut digunakan untuk merujuk pada tujuan syariah.

Mashlakhah merupakan tujuan utama Makashid Syariah yakni mencapai kebaikan tanpa melanggar aturan Syariah.

Para sarjana modern membagi kriteria mashlakh menjadi dua bagian. Pertama, mashlakh tidak mutlak, yaitu relatif atau subyektif, itu membuat orang tunduk pada keinginan mereka. Kedua, mashlakh kulliyah, dan keragamannya tidak bertentangan dengan sebagian (juziyat). Prinsip ini diakui tidak hanya oleh umat Islam, tetapi oleh hampir semua agama.

Ada tiga bagian tingkatan Makashid Ashsyariat, yang didasarkan pada Mashraha, yang didasarkan pada kepentingan yang harus dipenuhi sebagai penengah para mantan Ulama.¹² :

¹⁰ Dawam Rahardjo, *Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi*, 1st edn (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 1999).

¹¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015).

a. Mashlahah al-Dharuriyyah

Mashlahh al-dharuriyyah adalah apa yang harus atau harus dilakukan oleh seorang mukallaf / orang untuk mencapai kesejahteraan dunia dan masa depan. Jika tidak ada, kehidupan dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa dan ibadah lainnya bisa rusak atau bahkan hilang. Misalnya Muamalat al-Shatibi membutuhkan Iwad tertentu sebelum kepemilikan.

Ada lima hal yang termasuk dalam kategori al-dharuriyyat dan harus selalu dijaga dan dipelihara.

- 1) Hifzu aldin, mendukung/mendukung agama.
- 2) Hifzu alnafs yang menjaga jiwa.
- 3) Hifdzu al'akl untuk menjaga hati.
- 4) Hifdzu alnasl/al'ird, memelihara atau mempertahankan garis keturunan dengan mengadakan perkawinan resmi yang religius dan bermartabat serta tidak melakukan zina.
- 5) Hifzu almal, kepemilikan dan pengambilan harta.

b. Mashlahah al-Hajiyyah

Ini adalah hal sekunder, sesuatu yang perlu ada sehingga dapat didukung ketika ada saat melakukan sesuatu. Namun, ketika dia tidak ada, dia tidak membahayakan atau membahayakan, tetapi dapat mempengaruhi kesulitan. Misalnya, al-Syatibi menunjukkan bahwa dalam hubungan antarmanusia terdapat fiqh muamal, qirad, moussaka dan salam. Pada prinsipnya, tujuan dari istilah ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, mengurangi hambatan, dan membuat segalanya lebih mudah.

c. Mashlahah al-Takhsiniyyah

Istilah modern adalah istilah tersier, suatu sifat perilaku atau kepribadian yang biasanya didukung oleh konvensi sosial, berdasarkan kepribadian yang baik dan kuat serta tidak bertentangan dengan akal sehat. tahsiniyat memiliki kesempurnaan yang dapat diselesaikan atau ditinggalkan.

¹² Moh. Toriquddin, 'TEORI MAQÂSHID SYARÎ'AH PERSPEKTIF AL-SYATIBI', *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6.1 (2014), 33–47.

Contoh yang diberikan oleh alSyathibi adalah larangan penjualan barang-barang najis dan efisiensi penggunaan air dan rumput.

Uraian makashid as-syariah di atas mengejar tujuan yang sama: kemakmuran seluruh umat manusia. Mengingat beberapa kategori yang tercantum di atas, tujuan Muslim adalah untuk lebih dekat dengan kondisi ideal dan untuk dapat terus membantu orang meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dalam Islam, konsep makashid al-Shyariya mengubah sistem ekonomi yang ada, terutama jika diterapkan pada ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi tradisional tidak mengenal istilah “perlindungan” atau “menjaga iman, jiwa, akal dan keturunan”.

D. Prinsip Hukum dan Moral Islam dalam Keuangan Islam

Prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam adalah pilar misi khalifah, meningkatkan kesejahteraan dan kehormatan masyarakat melalui peningkatan kapasitas intelektual untuk bekerja dan pengabdian. Prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam ini memenuhi sifat manusia dan dapat memiliki efek positif pada perkembangan masyarakat. Demikianlah gambaran singkat tentang beberapa konsep dasar hukum ekonomi Islam yang perlu Anda ketahui dan terapkan dalam praktik dalam kegiatan ekonomi Islam dalam rangka mengatasi masalah umat. Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam mendasari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang digunakan dalam semua kegiatan ekonomi Islam. Berikut adalah beberapa prinsip ekonomi Islam :

- a. Tauhid dan persaudaraan. Tauhid adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara seseorang dengan tuhan. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam akan sangat terjaga karena merasa bahwa Allah SWT. Anda akan selalu melihat apa yang dia lakukan. Sedangkan konsep yang dikenal dengan persaudaraan atau Uhuwa Islamia memberi makna persaudaraan yang tulus dan kerjasama antar saudara muslim dalam kegiatan ekonomi. Semua tentang persatuan dapat dijelaskan dalam firman Allah swt. dalam QS. al-Hadiid 57:4 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ

يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٠٥﴾

4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian Dia bersemayam di atas 'arsy Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

- b. Produktivitas dan bekerja. Dalam ekonomi Islam, manusia harus bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas yang tinggi agar dapat memberikan yang terbaik untuk kemaslahatan umat. Hasil dari pekerjaan ini harus dihargai sesuai dengan standar hidup yang layak, QS. at- Taubah 9:105.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ

عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

105. dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

- c. Pemerataan kekayaan. Mekanisme distribusi kekayaan Islam adalah melalui mekanisme zakat. Mekanisme zakat memungkinkan redistribusi kekayaan dari kaya ke miskin, QS. at-Taubah 9:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

103. ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Prinsip-prinsip tersebut di atas bertujuan untuk mengatur dan memberikan bimbingan atau pendidikan agar umat manusia tidak tertipu oleh masalah kegiatan ekonomi yang salah atau keliru.

Hukum ekonomi Islam sebagai ajaran yang komprehensif didasarkan pada prinsip-prinsip wushul fiqh muamal, kawaid dan filosofi hukum Islam. Oleh karena itu, sebagian besar ahli ekonomi Islam menyebut ekonomi Islam sebagai teori ekonomi yang menghindari segala transaksi yang berhubungan dengan riba (bunga), meysir (judi), dan harar (spekulasi), serta menghindari peningkatan kekayaan yang salah atau merugikan orang lain, dan pemahaman dalam praktik. Kami memperjuangkan keadilan daripada efisiensi, dan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang didukung oleh zakat dan amal saleh lainnya. Dalam kegiatan ekonomi berdasarkan hukum Islam, sumber hukum berikut digunakan:

- i). Al-Qur'an, sumber hukum Islam yang abadi dan utama, adalah kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sumber pertama dan terpenting dari ekonomi Syariah. Al-Qur'an juga memuat hukum-hukum ekonomi yang sejalan dengan tujuan dan cita-cita ekonomi Islam untuk menjamin stabilitas ekonomi.
- ii). Hadits dan Sunnah, Hadits dan Sunnah saling melengkapi dalam segala tindakan mereka setelah Al-Qur'an, pedoman hidup umat Islam. Keduanya merupakan sumber hukum bagi segala keputusan dalam ekonomi Islam. Hadits dan Sunnah adalah beberapa sumber hukum yang disebutkan setelah Al-Qur'an.
- iii). Ijma', ijma adalah sumber hukum ketiga, konsensus baik masyarakat dan ulama. Ijma adalah asas hukum baru yang muncul sebagai akibat dari demonstrasi segala perubahan

yang terjadi di masyarakat, termasuk di bidang ekonomi. iv). Ijtihad dan Qiyas, secara teknis ijtihad, berarti melanjutkan segala upaya untuk mendefinisikan masalah Syariah sesedikit mungkin. Di sisi lain, menurut para ulama eufonium, Qiyas menjelaskan isi yang tidak ada dalam nash Al-Qur'an dan Hadits dengan membandingkannya dengan yang diatur oleh hukum berdasarkan nash.

E. Implikasi Hukum dan Moral Islam dalam Aktivitas Ekonomi dan Keuangan

Apakah semua praktik LKS sesuai dengan fatwa DSN setempat? LKS harus mematuhi DSNMUI Partwa untuk diakui sebagai syariah compliant. Namun sekali lagi, kenyataannya banyak praktik LKS yang melampaui syariah bertentangan dengan fatwa DSN/MUI.

Untuk membuktikannya, mari kita bandingkan praktik MUI dan LKS anggota Dewan Syariah Nasional (DSN). Kami berharap perbandingan ini menjadi temuan positif bagi orang yang tertarik untuk mengembangkan LKS di negara kami, dan kami berharap dapat digunakan untuk meningkatkan pekerjaannya di masa depan.

Fatwa Pertama: Tentang Murabach Modern. Akad murabahah merupakan salah satu produk LKS yang banyak diminati masyarakat. Pengaturan ini merupakan alternatif yang sederhana dan terjangkau untuk berbagai jenis pembiayaan atau pinjaman dari bank tradisional atau lembaga keuangan dengan potensi pertumbuhan. Sebagian besar ulama di berbagai organisasi Fiqh nasional dan internasional menerima perjanjian Murabahah modern. Lembaga Fiqih Nasional MUI juga memberikan kewenangan untuk pelaksanaan Konvensi Murabahah sebagaimana tertuang dalam Dewan Syariah Nasional (DSN), Bab 04/DSNMUI/IV/2000. Fatwa DSN ini memberikan cakupan dan pedoman bagi bank syariah. Perjanjian Murabahah. Sebagian dan tidak. Tentang Muraba. DSN 04 / DSNMUI / IV / 200, "Bank membeli barang atas nama bank untuk melayani kebutuhan nasabah, dan pembelian ini harus sah dan tidak terbantahkan."¹³

¹³ MUI, *KUMPULAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) 2000-2007* (Jakarta: Jandiar Press, 2008).

LKS mana yang sebenarnya memberlakukan klausul ini sehingga barang yang dijual benar-benar dibeli? Faktanya, Bank Syariah dan LKS hanya memenuhi akad Murabahah ketika nasabah melakukan pembelian dan membayar sebagian kecil dari nilai barang dagangan (menghitung uang muka). Bank mana yang berani menyatakan dalam laporan keuangannya bahwa ia pernah memiliki aset tersebut dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabahnya? Tentu kita tahu bahwa bank-bank di negara kita hanya bertindak sebagai perantara apakah mereka mengakuinya sebagai syariah atau tidak.

Artinya bank hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan, bukan membeli produk untuk dijual kembali. Sebab, secara aturan dan fakta, bank dan LKS tidak bisa ikut bertransaksi secara riil. Dalam keadaan ini, bank mungkin tidak dapat memperoleh apa yang dibutuhkan nasabah atas nama bank itu sendiri. Akibatnya, bank jelas melanggar ketentuan DSN MUI di atas. Bagian 2. Kontrak Mudarava (pembagian manfaat) Kontrak Mudarava adalah kontrak yang diakui oleh para ulama. Oleh karena itu, kontrak ini dianggap sebagai tulang punggung praktik keuangan Islam. DSNMUI kemudian menjadi pedoman perbankan syariah, Fatwa No. Dikeluarkan 07/DSN MUI/IV/2000. Namun sekali lagi, praktik LKS perlu dimodifikasi. Fatwa dengan DSN ini “akan menanggung semua kerugian yang timbul akibat Mudarava, kecuali Mudarava (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyandang dana.” Berkenaan dengan klausul lain, DSN menyatakan bahwa "pemberi dana menanggung semua kerugian sebagai akibat Mudarava dan pengelola tidak akan menanggung kerugian apa pun selain sebagai akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kontrak." Prakteknya masih jauh dari apa ditetapkan oleh Fatwa DSN. Jika bank syariah dan LKS benar-benar mematuhi ketentuan ini, orang pasti akan berbondong-bondong untuk mengajukan pembiayaan Mudarava. Bank Islam akan tumbuh dalam waktu dekat. Masa depan yang lebih cepat dari bank tradisional. Tapi faktanya tidak semanis teori. Bank syariah dan LKS yang ada belum sepenuhnya mengimplementasikan Fatwa DSN. Oleh karena itu, pelaku usaha yang menerima dana dari bank syariah harus mengembalikan modalnya secara penuh, meskipun

mengalami kerugian. Fakta bahwa nasabah Bank Mudharaba Syariah diperlakukan seperti itu terlalu berlebihan. Bagian ketiga dari emas yang dijanjikan. Jaminan emas baru-baru ini menjadi metode investasi yang populer di bank syariah. Pegadaian emas sangat populer dan diminati banyak orang karena harga emas yang terus naik. Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa No. 25 / DSNMUI / III / 2002 mengizinkan praktik ini. Fatwa DSN menyatakan, "Biaya pemeliharaan dan pemeliharaan seorang mahun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman." Sementara itu, fatwa DSN 26/DSNMUI/III/22002 yang secara khusus mengatur tentang peraturan penjaminan emas, menyatakan: Bank Syariah atau LKS mana yang memenuhi persyaratan ini? Fakta bagian ini menegaskan bahwa LKS yang ada mengenakan biaya administrasi untuk pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai dalam jumlah yang sesuai dengan persentase tertentu dari jumlah obligasi. Tentunya jika LKS atau bank syariah ingin menerapkan fatwa di atas, dalam menentukan biaya pelayanan emas yang diagunkan, bank menentukan berdasarkan harga brankas (SDB). Namun, fakta menunjukkan bahwa biaya penyimpanan yang dikenakan oleh pelanggan tidak sesuai dengan biaya sebenarnya yang diperlukan untuk penyimpanan dan penyimpanan standar bank dan tidak melebihi nilai harga penyimpanan emas SDB. Jadi lagi-lagi praktik Perbankan Syariah/LKS justru melanggar Fatwa DSN.¹⁴

Ketiadaan hukum syariah bagi bank syariah sebenarnya merupakan ketidaksesuaian operasional dengan Fatwa DSN, yang menerapkan kila pada tingkat dasar, yaitu menggunakan yang tidak tepat. Kesenjangan antara LKS dan perbankan syariah ini akhirnya diakui Mula E. Siregar, Direktur Otoritas Perbankan Syariah, yang mengatakan bahwa sebenarnya bank syariah tidak menerapkan sistem syariah. Menurut Mulya, tidak ada bank syariah yang benar-benar syariah, dan tidak ada IDB.

Pernyataan Direktur BI ini merupakan fakta bahwa baik perbankan maupun LKS sebenarnya tidak menganut prinsip syariah, ini cukup mengejutkan

¹⁴ Bin Badri Muhammad Arifin, *Riba Dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah Penjelasan Secara Rinci Mengenai Macam-Macam Riba Dan Contoh Prakteknya Pada Zaman Ini* (Bekasi: Pustaka Dhiyaul Ilmi, 2018).

karena semua regulasi, bahkan struktur pengawasan, masih belum sepenuhnya syariah. LKS harus hidup dan berkembang sesuai syariah, dan yang terpenting lakukan.

F. Implementasi Sistem Keuangan Islam

Bagaimanapun, diyakini bahwa penerapan perbankan syariah yang benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, sifat pendapatan masyarakat yang meningkat, partisipasi mereka dalam penggalangan dana dan pemerataan penggalangan dana. Singkatnya, keberadaan sistem perbankan syariah (keuangan) yang benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan mengurangi kemiskinan. Keberhasilan penerapan sistem perbankan syariah akan berkontribusi pada pencapaian tujuan Syariah Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk ekonomi.

Sejak diperkenalkannya perbankan syariah merupakan fenomena yang relatif baru, untuk mewujudkan manfaat sistem (keuangan) perbankan syariah pada akhirnya diperlukan penelitian yang berkesinambungan untuk memajukan konsep perbankan syariah baik secara teoritis maupun praktis. Dalam hal ini, untuk mendukung keberhasilan penerapan perbankan syariah di Indonesia dalam sistem perbankan tradisional yang mapan, beberapa isu utama perlu diperhatikan, antara lain: (a) masalah pemikiran atau tindakan yang mengakar dalam kebiasaan menggunakan layanan perbankan tradisional atas dasar kepentingan; (b) Peraturan lembaga keuangan. Keislaman lainnya yang mengarah pada perlunya undang-undang perbankan syariah tersendiri, dan (c) daya saing bank syariah di sektor perbankan nasional, yang dalam beberapa hal memerlukan perlakuan khusus untuk meningkatkan struktur kelembagaan dan peluang penetrasi pasar.

Berdasarkan tuntutan industri muda, sistem keuangan syariah diharapkan dapat menjadi alternatif terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip suku bunga dalam sistem keuangan Islam memiliki implikasi makroekonomi yang signifikan, seperti prinsip investasi langsung harus bebas bunga serta prinsip investasi tidak langsung. Sebagai lembaga keuangan utama

dalam sistem keuangan modern, bank tidak hanya bertindak sebagai perantara keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai alat utama dalam industri jasa keuangan dan kebijakan moneter.¹⁵

G. *Infrastruktur Sistem Keuangan Islam*

Perlu adanya sistem tata kelola untuk memastikan tercapainya tujuan LKS serta perkembangan industri keuangan syariah, khususnya sektor perbankan di Indonesia. Sistem tata kelola lembaga keuangan Islam jelas berbeda dengan sistem tata kelola perbankan umum. Hal ini karena lembaga keuangan syariah wajib menerapkan prinsip syariah dalam semua produk, produk, transaksi, praktik, dan tata kelola perbankan syariah. Oleh karena itu, bank syariah membutuhkan sistem tata kelola yang dapat menegakkan hukum syariah.¹⁶

Sistem tata kelola yang dimaksud disebut dengan Sistem Tata Kelola Syariah atau secara umum Tata Kelola Syariah (SG) Lembaga Keuangan Syariah. SG menurut Isra memiliki kesamaan dengan konsep hisbah dalam sejarah. Dengan demikian sistem tata kelola syari`ah merupakan sistem tata kelola yang unik yang hanya ada pada lembaga keuangan syari`ah. Salah satu elemen penting dari sistem tersebut adalah keberadaan dewan syari`ah sebagai bagian struktur organisasi perusahaan.¹⁷

Tentu saja, lembaga keuangan yang menyediakan produk dan layanan Syariah perlu menerapkan sistem tata kelola yang memastikan bahwa prinsip-prinsip Syariah berlaku di seluruh perusahaan. Istilah Tata Kelola Syariah atau Tata Kelola Syariah diciptakan oleh badan standar internasional seperti AAOIFI (Auditor Akuntansi Lembaga Keuangan Islam) dan IFSB (Komisi Jasa Keuangan Islam) sebagai bentuk sistem tata kelola lembaga keuangan Syariah.

Menurut IFSB, tata kelola Syariah adalah "untuk memastikan bahwa lembaga keuangan Syariah memiliki proses independen untuk mengeluarkan

¹⁵ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).

¹⁶ Ali Rama, 'Analisis Sistem Tata Kelola Syariah Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia', *Jurnal Bimas Islam*, 8.1 (2015), 87–120 <<http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/Vol 8 no 1.pdf>>.

¹⁷ ISRA, *Islamic Financial System Principles and Operations*, 2nd edn (Kuala Lumpur: Isra Press, 2010).

fatwa Syariah terkait, menyebarkan informasi fatwa, dan melakukan audit internal atas kepatuhan Syariah. Seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi yang dapat digunakan untuk Dalam Hukum Syariah Ada tiga elemen utama definisi: (i) Struktur organisasi perusahaan mencakup dewan direksi Syariah dan Syariah. Fungsi yang konsisten seperti departemen dan audit internal. (ii) Pendapat atau pendapat independen tentang kepatuhan terhadap hukum Syariah (iii) Proses pemeriksaan kepatuhan terhadap hukum Syariah.¹⁸

Sangat penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan, transaksi, dan operasi LKS sesuai dengan prinsip Syariah dan moral Islam. Sebagai salah satu unsur penting dalam tata kelola syariah, DPS menjadikannya sebagai lembaga yang ideal untuk memenuhi fungsi muhtasib sebagai badan internal sistem Hisba dalam konteks LKS modern. Kerangka tata kelola syariah mencakup aspek ex ante dan ex post kepatuhan syariah. Ex ante mengacu pada proses penerbitan dan pendistribusian Fatwa. ex post merupakan proses review syariah internal secara berkala dan tahunan. Proses Ex ante melalui tahapan proposal produk, pengajuan hukum, tinjauan Syariah dan penyebaran Fatwa. Proses pasca terdiri dari tinjauan reguler dan tahunan hukum Syariah.¹⁹

¹⁸ IFSB, *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services* (Kuala Lumpur, 2009).

¹⁹ Ali Rama, 'Analisis Komparatif Model Shariah Governance Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Negara ASEAN', *Penelitian Puslitpen UIN Syarif Hidayatullah*, 2016 <<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1444.2002>>.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan materi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Secara umum, ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai perilaku umat Islam dalam semua kegiatan ekonomi syariah yang harus sesuai dengan pedoman hukum Islam dalam rangka mewujudkan dan memelihara Syariah Makashid (agama, jiwa, akal, asal usul dan harta benda).
2. Kebijakan keuangan Islam pada dasarnya berarti: (a) hanya mengambil yang halal dan baik; (b) Metode pengadaan halal: melalui bisnis sukarela; c) Cara Membeli Halal: Jujur dan Hindari Keraguan. (d) Cara menggunakan halal: Saling membantu dan menghindari risiko yang tidak semestinya.
3. Sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pembangunan yang ditujukan untuk kemakmuran ekonomi dan keadilan sosial. Namun, semua itu membutuhkan konsep dan kerangka kerja yang sejalan dengan pedoman Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad, sehingga kami berharap semua pekerjaan muamalat yang dilakukan di dunia tidak hanya menguntungkan di dunia, tetapi juga akan bermanfaat. dilakukan di dunia. , juga memiliki nilai agama (pahala) di mata Allah.

B. Saran

Dalam penulisan makalah ini, penulis berharap para pembaca khususnya mahasiswa memahami dan memahami teori dan konsep dasar keuangan syariah. Penulis membutuhkan kritik dan saran untuk perbaikan penulisan karya selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, K. (2017). Konseptualisasi Ekonomi Dan Keuangan Syariah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, 13th edn (Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia Cendekia, 2009)
- Arafah, Muh, *SISTEM KEUANGAN ISLAM: SEBUAH TELAAH TEORITIS*, *Journal of Islamic Economic and Business*, 2019, 1
- Arif, M. Nur Rianto Al, *Pengantar Ekonomi Syari'ah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015)
- Ibrahim, Muhammad Qutb, *Bagaimana Rasulullah Mengelola Ekonomi Keuangan Islam Dan System Administrasi* (Gaung Perseda Press, 2007)
- IFSB, *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services* (Kuala Lumpur, 2009)
- ISRA, *Islamic Financial System Principles and Operations*, 2nd edn (Kuala Lumpur: Isra Press, 2010)
- Kadir, A. (2011). Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Alauddin University Pers, Makassar*.
- Kahf, Monzer, *The Islamic Economy: Analytical Study of The Functioning Of the Islamic Economic System* (T.tt.: Plainfield In Muslim Student Association of U.S and Canada, 1978)
- , *The Islamic Economy* (Plainfield: Muslim Student Association (US-Canada), 1978)
- Kholis, Nur, 'Potret Perkembangan Dan Praktik Keuangan Islam Di Dunia', *Millah: Jurnal Studi Agama*, XVII.1 (2017), 1–30
<<https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art1>>
- Mannan, M A, 'M.A. Mannan, Islamic Economics as a Social Science: Some Methodological Issues', *Journal of Research in Islamic Economics*, 2.1 (1984), 49–50
- Muhammad Arifin, Bin Badri, *Riba Dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*

- Penjelasan Secara Rinci Mengenai Macam-Macam Riba Dan Contoh Prakteknya Pada Zaman Ini* (Bekasi: Pustaka Dhiyaul Ilmi, 2018)
- MUI, *KUMPULAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) 2000-2007* (Jakarta: Jandiar Press, 2008)
- Pedia, Toko, 'Uang - Keuangan', 2009 <<https://kamus.tokopedia.com/u/uang-keuangan/>>
- Qardhawi, Yusuf, *Daur Al-Qiyam Wa Al-Akhlaq Fi Al-Iqtishad Al-Islamiy*, Terj. Zainal Arifin Dan Dahlia Husin (Surabaya: Gema Insani Press, 1997)
- Rahardjo, Dawam, *Islam Dan Transformasi Sosial Ekonomi*, 1st edn (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 1999)
- Rama, Ali, 'Analisis Komparatif Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Negara ASEAN', *Penelitian Pustitpen UIN Syarif Hidayatullah*, 2016 <<https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1444.2002>>
- , 'Analisis Sistem Tata Kelola Syariah Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia', *Jurnal Bimas Islam*, 8.1 (2015), 87–120 <<http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/Vol 8 no 1.pdf>>
- Samsul, S., Hamid, N. M., & Nasution, H. G. (2019). Sistem Pengendalian Inflasi dalam Sistem Ekonomi Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(1), 16-28.
- Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003)
- Toriquddin, Moh., 'TEORI MAQÂSHID SYARÎ'AH PERSPEKTIF AL-SYATIBI', *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 6.1 (2014), 33–47